

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam mendukung pemerintahan yang demokrasi secara otonomi dan juga mengikuti keberhasilan pembangunan daerah, maka otonomi daerah dilaksanakan melalui pembangunan daerah yang bersangkutan (UU No. 22 Tahun 1999). Peraturan perundangan ini telah direvisi sedemikian rupa sampai berkali-kali, sehingga menghasilkan revisi terakhir yakni Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk menunjukkan kemandirian daerah. Untuk mewujudkan kemandirian daerah tersebut maka peningkatan sumber pendanaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang sangat efektif serta optimal dalam pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerah melalui tata kelola pemerintah yang notabennya didanai dari PAD tersebut.

PAD ini merupakan suatu pendapatan daerah otonomi dimana pendapatan ini diperoleh pada bidang sumberdaya di wilayahnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui perundang-undangan Negara Indonesia. Dalam hal tersebut tentunya meliputi empat jenis sumber pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan juga hasil pengelolaan kekayaan yang tak terpisahkan dan juga hasil dari usaha daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Diharapkan dengan adanya PAD pemerintah daerah tersebut maka ini menjadi modal utama penyelenggaraan roda pemerintahan serta terwujudnya pembangunan yang merata sesuai dengan yang diinginkan dalam cita-cita

demokrasi. Oleh sebab itu sudah seharusnya setiap pemerintahan daerah mengoptimalkan secara efektif sumber PAD nya. Walaupun sumber pendapatan ini belum sepenuhnya dapat membiayai kemandirian daerah.

Sebagian besar dana yang diterima mencerminkan setidaknya hasil pendanaan daerah dan alokasi keuangan pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya di Indonesia banyak daerah yang belum mampu membiayai seluruh belanja pemerintah daerah karena kontribusinya yang relatif kecil dan masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Khusus. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi PAD antara lain Produk Domestik Regional Bruto Daerah (PDRB) dan Inflasi Daerah.

Pertumbuhan suatu PAD daerah baik naik ataupun turun tentunya tidak dapat dipisahkan dengan adanya gejala atau penyebabnya seperti pertumbuhan PDRB ataupun juga inflasi. Jika ingin memahami situasi ekonomi daerah akan lebih baik terlebih dahulu memperhatikan suatu pertumbuhan PDRB. Sebab PDRB ini mencakup semua kegiatan ekonomi daerah. Apabila PDRB meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan suatu daerah telah berhasil meningkatkan dan membantu perekonomiannya. PDRB sendiri tidak lepas dari ketiga metode produksi dan pengeluaran, pernyataan ini telah dikonfirmasi oleh penelitian sebelumnya yaitu (Latipari et al., 2017: 160) dimana ia menyimpulkan bahwasanya PDRB adalah total dari nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam daerah dalam kurun waktu tertentu.

Mengingat PDRB merupakan fungsi PAD, maka peningkatan PDRB merupakan peluang yang sangat baik dan optimal bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Namun untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB tersebut tidak dapat dipisahkan dengan fungsi keberadaan jumlah penduduk karena yang menjadi penggerak utama PDRB itu sendiri adalah manusia yang menjadi penduduk wilayah. Seorang ahli ekonom klasik yakni Adam Smith menyatakan bahwa penduduk merupakan faktor input yang sangat potensial yang dalam menghasilkan suatu barang dan jasa produksi baik mikro maupun secara makro. Jadi, semakin besar populasinya penduduk maka akan semakin banyak pekerja yang bisa digunakan sehingga menghasilkan pertumbuhan PDRB yang optimal.

Selain PDRB yang dapat mempengaruhi PAD faktor lain juga seperti inflasi dapat mempengaruhi PAD. Inflasi merupakan dampak yang menyebabkan terpuruknya ekonomi daerah sebab inflasi ini merupakan kenaikan dari harga barang maupun jasa yang dihasilkan dan juga berdampak pada pendapatan masyarakat ditambah lagi dengan tingginya aktivitas masyarakat melalui permintaan dan penawaran sehingga inflasi tidak dapat terhindarkan. Inflasi suatu daerah menggambarkan kekacauan ekonomi, apabila inflasi tersebut dikendalikan secara tidak terkendali maka akan berdampak pada perekonomian, karena jika tingkat inflasi melebihi 25% maka tingkat inflasi yang baik adalah di bawah 10% yang akan mengakibatkan komoditas bernilai tinggi. Dan ini berdampak pada nilai tukar Rupiah dan nilai tukar Rupiah akan turun. (Sania et al., 2018: 76) memperkuat pernyataan ini. Peningkatan

pendapatan masyarakat juga harus diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa. Laju inflasi dalam daerah akan meningkat tergantung dari adanya permintaan dan penawaran atas sumber PAD seperti penggunaan hotel atau juga retribusi lainnya. Memang, jika pendapatan melambat maka pelaku ekonomi seperti pengusaha dalam daerah akan cenderung menaikkan tarif dan juga upah pekerjajanya dan secara otomatis akan menyebabkan terjadinya gejolak inflasi ekonomi, pengusaha akan cenderung sedikit menaikkan harga, tetapi selalu membayar upah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muslim et al., 2019) menyebutkan sudah selayaknya memang setiap pemerintah daerah dapat memaksimalkan dan juga mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga memiliki pendapatan yang dapat membiayai roda pemerintahannya dan juga tidak lagi bergantung dari pemerintah pusat. Dengan mengoptimalkan PDRB dan menahan laju inflasi serta meningkatkan PAD, oleh karena itu PDRB dan inflasi dapat diperkirakan akan mampu mempengaruhi PAD. Tabel di bawah ini adalah tabel data PAD Batam dari tahun 2015-2019 yang dihasilkan setiap tahunnya:

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	812.739.614.159,94	836.713.858.341,94	102,95
2016	909.266.681.460,69	881.268.969.156,50	96,92
2017	1.086.585.819.982,57	974.124.203.684,08	89,65
2018	1.235.027.230.923,76	1.084.608.191.852,99	87,62
2019	1.284.363.117.436,42	1.147.685.950.193,30	89,36

Sumber : Sistem Informasi Penerimaan Daerah

Dari data di atas bisa kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami fluktuasi dan selisih nilai yang cukup

berarti. Pada tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan sebesar 6,03 %. Seperti halnya pada tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar 7,27 %. Selanjutnya pada tahun 2018 PAD Kota Batam juga mengalami penurunan sebesar 2,03 % dan pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 1,74 %. Apabila dikaitkan dengan PDRB dan inflasi penurunan ini terjadi karena semakin rendah pendapatan perkapita Kota Batam, semakin rendah pula potensi sumber penerimaan daerah. Sehingga kemampuan masyarakat membayar pajak yang menurun. Sedangkan apabila terjadi inflasi akan berdampak buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil.

Dalam penelitian (Muslim et al., 2019), PDRB, populasi penduduk dan tingkat inflasi mempengaruhi PAD Kota Kendari, didalam penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwasanya PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari. Jumlah warga penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. Inflasi memiliki dampak positif pada PAD pada tahun 2012-2017.

Untuk menjawab masalah di atas dan melihat keberadaan kontradiksi yang baik antara teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi pengaruh PDRB serat inflasi terhadap PAD. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti judul. **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang permasalahan yang telah peneliti diuraikan secara jelas dapat diambil beberapa kesimpulan dalam bentuk poin identifikasi berikut :

1. Jumlah potensi daerah yang masih kurang dimanfaatkan membuat penerimaan asli dari pajak setiap wilayah tetap rendah dan menyebabkan ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
2. Penghasilan Kota Batam mengalami fluktuasi dari 2015 hingga 2019, dan perbedaan nilainya cukup signifikan.
3. Penurunan Kota Batam disebabkan oleh penurunan PDRB daerah dan mengurangi potensi sumber pendapatan daerah. Yaitu, kemampuan untuk membayar pajak masyarakat akan berkurang.
4. Terjadinya inflasi akan berdampak negatif pada ekonomi Batam, salah satunya mengurangi pendapatan riil.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, desain masalah itu disebabkan oleh keterbatasan material, waktu dan ruang lingkup penelitian, sehingga penulis membatasi masalah, yaitu:

1. Penelitian ini membahas dampak PDRB dan inflasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Penelitian ini hanya dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Periode penelitian adalah 2015-2019 (5 tahun).

1.4. Rumusan Masalah

Dari beberapa penguraian dalam latar belakang masalah serta yang telah diidentifikasi peneliti dapat maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin rumusan masalah yang sebenarnya ingin diteliti seperti dibawah ini:

1. Apakah dikota Batam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah inflasi yang terjadi dikota batam dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Dan secara bersamaan apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti lakukan berdasarkan rumusan masalah pada point sebelumnya adalah:

1. Peneliti ingin menganalisis serta mengetahui dan memahami apakah di kota Batam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
2. Peneliti ingin menganalisis serta mengetahui dan memahami apakah di kota Batam inflasi yang terjadi berdampak pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
3. Menganalisis, mengetahui serta memahami apakah Produk Domestik Regional Bruto daerah (PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mampu

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca nantinya peneliti berharap hasil dari Penelitian ini dijadikan rujukan dan juga menambah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, terutama tentang faktor PDRB dan inflasi yang terjadi terhadap pendapatan daerah di Kota Batam.

2. Bagi penulis

Melalui hasil penelitian yang dilakukan ini nantinya peneliti berharap dapat berguna untuk memperdalam teori dan pengetahuan penulis dan memberi tahu orang-orang bahwa teorinya adalah cara untuk memperoleh pengetahuan menggunakan fakta yang ada.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan (terutama yang terkait dengan perpajakan regional) untuk membantu mengembangkan dan pada akhirnya ekonomi Daerah dan untuk mendorong kemajuan di masa depan.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, para peneliti berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan perspektif teori yang diterima di lapangan sehingga pemahaman yang andal tentang pendapatan daerah tercapai.